

**DIPA FISIP**

**LAPORAN PENELITIAN**



**Konflik Sosial di Desa Balinuraga:  
Suatu Pendekatan Sistemik untuk Analisis Konflik  
dan Transformasi**

**Oleh :**

**Drs. Susetyo, M.Si (Ketua)  
Drs. Ikram, M.Si (Anggota)  
Drs. Usman Raidar, M.Si (Anggota)  
Teuku Fahmi, S.sos, M.Krim (Anggota)**

**Dibiayai oleh Dana DIPA FISIP Universitas Lampung  
dengan Nomor Kontrak: 500/UN26.16/KU.02.00.01/2018**

**JURUSAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
TAHUN 2018**

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENELITIAN DIPA FISIP**

**Judul Penelitian** : Konflik Sosial di Desa Balinuraga: Suatu Pendekatan Sistemik untuk Analisis Konflik dan Transformasi

**Bidang Penelitian** : Ilmu Sosial

**Ketua Tim Pengusul**

a. Nama : Drs. Susetyo, M.Si.

b. Jenis Kelamin : Laki-laki

c. NIP/NIDN : 195810041989021001/004105814

d. Disiplin Ilmu : Sosiologi

e. Pangkat/Golongan : Pembina/IV a

f. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

g. Fakultas / Jurusan : FISIP/Sosiologi

h. Alamat : Rajabasa Permai, Bandar Lampung

i. Telp Kantor : (0721) 704656

j. HP/e-mail : 08127942197/susetyo@fisip.unila.ac.id

**Anggota Peneliti**

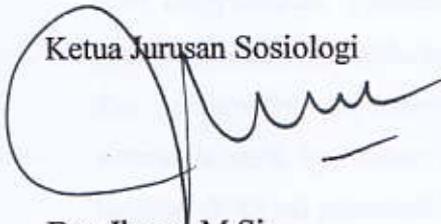
a. Nama Lengkap : Drs. Ikram, M.Si/0002066212.  
Drs. Usman Raidar, M.Si/001911605  
Teuku Fahmi, S.Sos, M.Krim/0030058501

**Lokasi Penelitian** : Kabupaten Lampung Selatan

**Biaya yang Diusulkan** : Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)

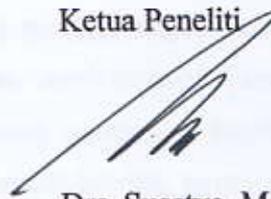
Bandar Lampung, 15 Agustus 2018

Ketua Jurusan Sosiologi



Drs. Ikram, M.Si  
NIP 196106021989021001

Ketua Peneliti



Drs. Susetyo, M.Si  
NIP 195810041989021001

Menyetujui, Ketua LPPM Universitas  
Lampung



Warsono, Ph.D  
NIP 196302161987031003

An. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kerjasama,



Drs. Susetyo, M.Si  
NIP 195810041989021001

# **Konflik Sosial di Desa Balinuraga**

## **Suatu Pendekatan Sistemik untuk Analisis Konflik dan Transformasi**

**Oleh**  
**Drs. Susetyo, M.Si, dkk**

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengembangkan pemahaman konflik yang lebih dalam dengan menggunakan teori kompleksitas dan transformasi konflik sebagai panduan teoritis, dan juga mengajukan cara hipotetis untuk memulai usaha *peace building* menurut teori transformasi konflik. Jenis penelitian yang akan diterapkan yaitu penelitian kualitatif eksploratif berdasarkan studi kasus ilustratif tunggal. Penelitian ini akan bergantung sepenuhnya pada data sekunder. Pendekatan analisis sistemik terdiri dari dua bagian; salah satunya adalah pemetaan konflik, atau analisis konflik itu sendiri, dan yang kedua menggunakan analisis ini untuk menyusun strategi proses transformasi merupakan lensa dalam penelitian ini. Analisis sistemik, sebuah metode yang menekankan pentingnya hubungan dan efek yang dimiliki masing-masing pihak terhadap semua subsistem yang berbeda. Studi ini telah menunjukkan analisis tentang multiple sistem mengenai konflik di Balinuraga melalui lensa transformasi konflik dan teori kompleksitas. Temuan-temuan menunjukkan bahwa transformasi konflik dapat membawa suatu wilayah, kelompok menjadi maju, menuju demokrasi, pembangunan dan perdamaian. Ini membutuhkan implementasi yang hati-hati dan pemantauan sistematis serta komitmen dari semua pemangku kepentingan yang berkonflik dan bantuan eksternal potensial. Transformasi konflik, termasuk rekonsiliasi, perubahan tata kelola, transformasi sikap dan perilaku serta pembangunan kepercayaan adalah proses untuk mengungkap dalam waktu yang cukup lama, bahkan puluhan tahun dan orang seharusnya tidak mengharapkan hasil segera.

***Kata kunci: konflik, transformasi konflik, pendekatan sistem, membangun perdamaian***

## DAFTAR ISI

HALAMAN MUKA	
HALAMAN PENGESAHAN	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	3
1. LATAR BELAKANG	
2. PERTANYAAN PENELITIAN	
3. TUJUAN PENELITIAN	
4. MANFAAT PENELITIAN	
BAB II KERANGKA TEORI	9
1. KOMPLEKSITAS KONFLIK	
2. TRANSFORMASI KONFLIK	
BAB III METODE PENELITIAN	14
1. JENIS PENELITIAN	
2. SUMBER DATA	
3. METODE ANALISIS	
4. BATASAN KONSEP	
BAB IV GAMBARAN DAERAH PENELITIAN	21
1. KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	
2. DAERAH RAWAN KONFLIK SOSIAL	
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
1. KECAMATAN WAY PANJI DAN KALIANDA	
2. KONFLIK BALINURAGA DAN AGOM	
3. ANATOMI KONFLIK	
4. PEMETAAN SEBAB-AKIBAT KONFLIK	
5. AKIBAT KONFLIK	
6. ANALISIS KONFLIK TINGKAT MESO	
7. PENDEKATAN SISTEMIK TERHADAP TRANSFORMASI KONFLIK	
8. PERENCANAAN STRATEGIS UNTUK TRANSFORMASI KONFLIK	
9. MOBILISASI AGEN-AGEN PERUBAHAN PERDAMAIAN	
10. MASYARAKAT SIPIL	
11. KELOMPOK-KELOMPOK PEREMPUAN	
12. LEMBAGA AGAMA	
13. KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN UMUM	
BAB VI PENUTUP	39
A. KESIMPULAN	
B. SARAN	
DAFTAR PUSTAKA	41

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia adalah majemuk terdiri atas beragam ras, etnik dan agama dan masing-masing memiliki karakteristik yang khas. Masing-masing ras dan etnik masih banyak yang tersegregasi dalam suatu wilayah pemukiman dengan seperangkat adat-istiadatnya masing-masing yang khas. Kondisi ini masih dipertahankan ketika suatu kelompok ras, etnik dan agama bermigrasi di daerah-daerah lain, termasuk di Provinsi Lampung. Dari hasil penelitian beberapa ahli ditemukan bahwa karakteristik utama masyarakat majemuk adalah tersegmentasi, memiliki struktur sosial beragam, kurang dapat mengembangkan pikiran bersama, rentan terjadi konflik, terintegrasi secara paksa, saling mendominasi, dan tidak terdapat referensi nilai budaya dominan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan realitas sering terjadi konflik kekerasan di banyak daerah di Indonesia, maka DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Kemudian pada tahun 2013 ditindaklanjuti dengan dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Pada tataran implementasi, maka kebijakan penanganan konflik sosial harus didukung dengan upaya membangun perdamaian (*peace building*) atau Bina Damai, terutama dalam merekonstruksi dan memperkuat kembali berbagai aspek kehidupan masyarakat yang rusak pasca konflik.

Ada 5 (lima) kasus Konflik sosial berbasis pada aspek psikososial yang berkembang menjadi konflik antar kelompok warga yang benuansa etnik di Kabupaten Lampung Selatan, yaitu:

- a. Konflik yang terjadi di Desa Waymuli, Kecamatan Rajabasa. Konflik terjadi pada tanggal 11 Juli 2011, antara warga Desa Kunjir (suku Lampung) dengan warga Desa Way Muli (suku Serang Banten). Perselisihan bermula dari persaingan dalam mendapatkan seorang gadis, kemudian berkembang saling merasa tersinggung. Kemudian berkembang emosi dan marah sampai pada pertengkaran dengan perkataan dan perilaku kasar dan saling mengejek. Pada puncaknya warga bernama Misjak dan

Barja mengeluarkan golok dan membacok Aan warga Desa Way Muli. Peristiwa ini kemudian meluas menjadi konflik antar warga melibatkan 300 orang suku Lampung dan 250 orang suku Serang Banten. Konflik terbuka siap terjadi tetapi dapat dicegah, karena segera mendapat pengamanan dan diselesaikan secara musyawarah melalui aparat desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.

- b. Konflik yang terjadi di Desa Marga Catur, Kecamatan Way Panji. Pada tanggal 25 November 2011 terjadi perkelahian antara I Wayan Anggi dari etnik Bali warga Desa Sido Makmur Kecamatan Way Panji dengan seorang pemuda etnik Lampung dari Desa Marga Catur, Kecamatan Way Panji. Perkelahian bermula dari bersenggolan saat berjoged di panggung hiburan organ tunggal disebuah acara pesta pernikahan pada hari Sabtu malam. Dalam perkelahian itu, I Wayan Anggi tertusuk dan menderita luka parah lalu dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeluk. Namun karena lukanya parah akhirnya keesokan harinya meninggal dunia. Kemudian pada tanggal 29 November 2011 sekitar 100 orang warga desa Sido Makmur melakukan penyerangan terhadap warga di Desa Marga Catur yang mengakibatkan 25 rumah rusak dan terbakar. Kemudian, warga Desa Marga Catur dari etnik Lampung yang berjumlah 300 orang melakukan perlawanan terhadap orang Bali, namun dapat dicegah oleh polisi dan TNI yang dibantu oleh tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat lainnya, sehingga dapat mencegah jatuhnya korban.
- c. Konflik yang terjadi di Dusun Napal, Desa Sidowaluyo, Kecamatan Sidomulyo. Pada hari Minggu, 22 Januari 2012 seorang pengendara sepeda motor (etnik Lampung) dari Desa Kota Dalam yang melewati Pasar Sidomulyo ditarik uang parkir oleh seorang dari Dusun Napal (etnik Bali). Pengendara sepeda motor merasa tidak terima ditagih uang parkir. Kemudian terjadi perkelahian dan dapat dileraikan oleh warga. Pada malam harinya, sekitar 400 orang warga Desa Kota Dalam mau menyerang warga Dusun Napal, tetapi berhasil dicegah. Pada hari Senin, 23 Januari 2012, seorang pengendara sepeda motor warga Desa Kota Dalam melewati Dusun Napal, dicegat dan nyaris dipukuli oleh warga setempat. Kejadian ini membuat emosi warga Kota Dalam memuncak. Kemudian pada hari Selasa siang, 24 Januari 2012 ratusan warga

Kota Dalam menyerang warga Dusun Napal, membakar sekitar 50 rumah. Hampir 1.000 aparat polisi dan TNI sudah dikerahkan, tetapi tidak mampu mencegahnya. Akhirnya, perdamaian dapat dilakukan melalui mediasi dengan melibatkan semua pihak.

- d. Perselisihan antar pemuda warga Dusun Prapatan dan Dusun Negeri Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang, diawali dari saling mengejek. Tindakan ini muncul ucapan penghinaan dan perilaku yang dianggap tidak menyenangkan. Oleh karena masing-masing pihak saling tersinggung dan merasa dilecehkan. Pada tanggal 18 juni 2012 perselisihan tersebut memuncak dan tidak terkendali, sehingga terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Daniel dan kawan-kawannya warga Dusun Negeri terhadap Tri Setiawan dan Rizki Putra warga Dusun Prapatan. Isu pengeroyokan kemudian meluas dan memicu terjadinya bentrok antara warga dua dusun tersebut. Kemudian sekitar 400 orang warga Dusun Prapatan melakukan penyerangan terhadap warga Dusun Negeri yang melibatkan sekitar 300 orang. Akibatnya 1 unit sepeda motor dan 1 rumah terbakar. Konflik diselesaikan melalui musyawarah yang melibatkan tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, Polri dan TNI.
- e. Konflik terjadi di Desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji. Pada hari Sabtu, 27 Oktober 2012 sekitar pukul 13.00 WIB, dua gadis Lampung warga Desa Agom pulang dari pasar Patok Desa Sidoarjo Kecamatan Way Panji menuju Desa Agom Kecamatan Kalianda berboncengan sepeda motor. Ketika melewati wilayah sepi yang masih terdapat banyak sawah warga, mereka didekati 2 lelaki warga Desa Balinuraga berboncengan sepeda motor memepet motornya dan diduga “sambil memegang buah dada perempuan tersebut” hingga terjatuh di paritan jalan. Bersamaan dari itu ada warga etnik Lampung menolongnya, mengantar kerumah, dan ke Rumah Sakit Umum Kalianda Lampung Selatan. Malamnya, warga dan Kepala Desa Agom menuntut pertanggungjawaban ke Balinugara, tetapi tidak ada kesepakatan, dan sekitar pukul 16.00 WIB mereka pulang. Kemudian Kades Agom dan orang tua korban lapor polisi, dan segera ditindaklanjuti mencari pelakunya, tetapi

disembunyikan warga agar tidak ditangkap polisi. Warga Desa Agom akhirnya kesal dan melaporkan kejadian tersebut kepada ketua-ketua adat dari beberapa Marga Lampung di Lampung Selatan. Pada hari Sabtu malam, 27 Oktober 2012, massa etnik Lampung mendatangi Desa Balinuraga mencari pelaku. Tetapi sudah disambut dengan ratusan warga Desa Balinuraga lengkep dengan senjata tajam dan senpi. Akibatnya dua orang etnik Lampung luka serta satu sepeda motor dibakar. Pada hari Minggu pagi tanggal 28 Oktober 2012 pukul 10,00 WIB terjadi penyerangan ke Desa Balinuraga yang mengakibatkan dua orang warga Lampung meninggal dunia. Pada sore harinya sekitar pukul 13.00 WIB kembali terjadi penyerangan ke Desa Balinuraga, berakibat satu orang etnik Lampung tewas serta dua orang terkena luka tembak di kaki. Pada hari Senin 29 Oktober 2012 massa Lampung sekitar 20.000 orang dari berbagai daerah pada pukul 08.00 WIB kembali berkumpul, untuk menyerang kembali warga Desa Balinuraga. Pada awalnya penyerangan akan dilakukan pada pukul 10.00 WIB, tetapi karena dari tokoh adat memiliki pertimbangan lain, akhirnya penyerangan dilakukan pada pukul 14.00 hingga 16.30 WIB. Serangan kali ini mengakibatkan warga Balinuraga banyak yang meninggal dunia, mengungsi, bangunan dirusak dan dibakar, dan kerugian harta benda. Konflik ini diselesaikan melalui perundingan panjang yang melibatkan tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, Polri dan TNI.

Kondisi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan yang rentan konflik kekerasan tersebut menunjukkan, *pertama*, rendahnya ketahanan sosial. *Kedua*, tidak efektifnya sistem deteksi dini dan respon dini masyarakat terhadap potensi konflik sehingga dengan cepat berkembang menjadi konflik terbuka. *Ketiga*, tidak tuntasnya upaya penyelesaian konflik-konflik sosial yang terjadi. Penyelesaian konflik memiliki alat yang terbatas untuk menangani konflik yang banyak banyak aktor dan kompleksitas hubungan, dan kadang kala tanpa pemimpin untuk mewakili kelompok-kelompok pada berbagai tingkat masyarakat dan terlibat dengan kelompok lain. Oleh karena itu harus diakui bahwa diperlukan pendekatan baru untuk memahami konflik.

## **2. Pertanyaan Penelitian**

Penelitian ini akan melihat konflik yang terjadi di Desa Balinuraga dengan menggunakan teori kompleksitas dan transformasi konflik sebagai alat teoritis untuk memahami konflik itu sendiri, dan menyelidiki kemungkinan jalan menuju perdamaian positif. Penelitian ini akan fokus untuk menjawab pertanyaan berikut ini: “Bagaimana teori kompleksitas dan transformasi konflik dapat menjelaskan kompleksitas konflik di Balinuraga dan potensi-potensi menuju perdamaian positif?”

## **3. Tujuan Penelitian**

Dengan banyaknya konflik yang berkepanjangan yang telah memunculkan kembali kekerasan dalam dekade-dekade terakhir (Collier, 2003), nampaknya problematisasi konflik dan konseptualisasi resolusi konflik perlu mendapatkan perhatian kembali atau dikaji ulang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman konflik yang lebih dalam dengan menggunakan teori kompleksitas dan transformasi konflik sebagai panduan teoritis. Dengan memahami konflik ini, penelitian ini akan mengajukan cara hipotetis untuk memulai usaha *peace building* menurut teori transformasi konflik, seperti yang dirumuskan oleh Lederach.

## **4. Pentingnya penelitian**

Dalam beberapa dekade terakhir, praktik-praktik *peace building* berfokus pada penghentian permusuhan sesegera dengan berbagai keberhasilan mencapai perdamaian jangka panjang. Studi ini menunjukkan bahwa kerangka kerja yang berbeda mungkin berhasil mencipta konsep baru dan menangani konflik etnis. Ini berfokus pada penyediaan saran untuk penerapan teori kompleksitas dan transformasi konflik ke dalam konflik yang selama ini diabaikan oleh literatur.

Proses reformasi di Indonesia telah dilakukan sejak tahun 1998 dan hanya memberi sedikit waktu kepada para ilmuwan untuk memberikan solusi konstruktif terhadap peningkatan kekerasan etnis dan agama di negara ini. Oleh karena itu, penelitian ini ingin menyarankan kerangka kerja *peace building* yang bisa diterapkan di Balinuraga. Pengetahuan dan proses transformasi konflik yang disarankan dalam penelitian ini dapat

membantu mereka yang terlibat dalam pembangunan perdamaian, baik di lapangan regional maupun di lapangan tingkat nasional, dan mendorong mereka untuk menemukan jalan keluar dari konflik yang berkepanjangan menuju konsolidasi demokrasi melalui transformasi yang konstruktif.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

Bagian ini akan memperkenalkan kerangka teoretis yang akan digunakan untuk menganalisis konflik di Balinuraga. Pertama, menguraikan teori kompleksitas, sebuah pendekatan Sosiologis yang memandang konflik sebagai seperangkat sistem *inter-related* dan *inter-dependent* yang kompleks dan oleh karena itu dapat membantu memahami lebih jauh konflik etnis. Kedua, kerangka teoritis yang membahas transformasi konflik dan potensinya untuk mendorong perubahan guna mentransformasikan konflik menuju perdamaian.

#### **1. Kompleksitas Konflik**

Menurut Boulding, konflik "beroperasi di tepi kekacauan - tidak sepenuhnya acak tapi tidak dalam ekuilibrium" (Boulding, 1962). Memang, konflik terdiri dari berbagai faktor yang saling mempengaruhi, dan juga tunduk pada sifat manusia yang tidak pasti. "Manusia tidak hanya bergerak dengan tekanan langsung namun dengan tujuan, rentan terhadap perubahan sebagai akibat perubahan informasi terkini" (Boulding, 1962). Oleh karena itu, hubungan antara aktor terus berubah sehingga memodifikasi tantangan dan isu yang dipertaruhkan dalam konflik. Interaksi membuat konflik tidak stabil dan sulit diprediksi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, resolusi konflik telah gagal menciptakan perdamaian dalam perjuangan akhir-akhir ini karena cenderung untuk sekadar mengatasi konflik. Kajian ini menegaskan bahwa resolusi konflik memiliki alat yang terbatas untuk menangani konflik yang terdiri dari banyak aktor dan hubungan, tanpa pemimpin untuk mewakili kelompok-kelompok pada berbagai tingkat masyarakat dan terlibat dengan kelompok lain.

Oleh karena itu harus diakui bahwa diperlukan pendekatan baru untuk memahami konflik. Walby mengambil konsep kompleksitas, yang secara tradisional ditemukan di dalam ilmu alam seperti Biologi, Fisika, dan Kimia, dan mengkonseptualisasikannya dari sudut pandang Sosiologis untuk menganalisis globalisasi dan banyak faktor yang berinteraksi dalam fenomena ini (Walby, 2003). Walby telah dikritik karena mencoba

masuk ke dalam konteks Sosiologis, sebuah teori yang berasal dari sains dimana kausalitasnya dapat diukur secara matematis dibandingkan dengan yang diamati. Namun, teori Walby yang menyoroti pentingnya mempertimbangkan situasi sosial sebagai jaringan elemen dan dengan mempertimbangkan keterkaitannya terbukti sangat berguna dalam mempelajari konflik sosial. Teori kompleksitas melihat dunia terdiri dari serangkaian hubungan sosial seperti kelas, jenis kelamin, etnisitas atau usia dan masing-masing elemen dari sistem yang terdiri dari banyak elemen interaksi yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain<sup>41</sup>. Setiap elemen dapat menjadi bagian dari lebih dari satu sistem yang memaksa semua sistem untuk berinteraksi. Oleh karena itu "gangguan ringan bisa menyebabkan perpecahan dengan hasil yang tidak dapat diprediksi" (Boulding, 1962).

Begitulah konflik terbentuk: banyaknya sistem yang berinteraksi dan menciptakan konflik saat ada kontradiksi antara sistem ini. Sementara teori kompleksitas tidak dapat memprediksi hasil dari interaksi sistem, teori kompleksitas dapat mempersiapkan pengamat eksternal untuk ketidakpastian hasil yang diciptakan oleh dinamika sistem. Teori kompleksitas juga menyiratkan identifikasi dari semua sistem hadir dalam fenomena yang diteliti. Dalam kasus konflik, memungkinkan untuk membatasi analisis terhadap sistem yang berhubungan langsung dengan perlawanan (Hendrick, 2009). Ini membantu menyoroti hubungan, isu dan prioritas di setiap sistem dan dalam konflik secara keseluruhan. Hal ini memastikan bahwa pendekatan *peace building* "Bina Damai" tetap fokus pada masalah yang dipertaruhkan. Menyadari sistem yang berbeda dapat memberikan perspektif yang berbeda mengenai masalah ini. Bina Damai membutuhkan fleksibilitas, kreativitas dan empati sehingga banyak lensa dapat meningkatkan pemahaman akan masalah ini dan membantu menciptakan strategi yang tepat untuk merespons masalah tersebut.

Teori kompleksitas adalah pendekatan yang sangat berguna saat berhadapan dengan konflik etnis. Memang konflik etnik hadir spesifik dan bahkan lebih kompleks karakteristik daripada konflik lainnya karena interaksi antara banyak sistem yang terlibat dalam konflik dipengaruhi oleh faktor yang tidak terlihat seperti identitas, budaya, keluhan dan ketidakpercayaan (Lapid, 1989). Terjalannya proses etnik dan kekuasaan memicu konflik lebih jauh ke dalam masyarakat, sehingga sulit untuk dipahami dan dianalisis. Teori kompleksitas membantu menghindari menyederhanakan dan reduksionis pendekatan

analisis linier. Sebaliknya, hal itu memperhitungkan dinamika dan saling mempengaruhi pihak-pihak yang saling bertentangan satu sama lain. Kompleksitas memberikan lebih kaya dan tingkat analisis konflik yang lebih dalam.

Teori transformasi konflik dibangun berdasarkan gagasan tentang sistem yang berinteraksi ini sebagai akar konflik. Dibutuhkan teori selangkah lebih maju kompleksitasnya dengan mengusulkan bahwa terlepas dari kompleksitas, sistem dan interaksinya dapat dianalisis, dimodelkan dan dipengaruhi untuk mendorong perubahan dan akhirnya mencapai perdamaian yang berkelanjutan.

## **2. Transformasi Konflik**

Transformasi konflik (Lederach, 2003) adalah sebuah istilah yang telah diciptakan pada akhir 1980-an oleh John Paul Lederach. Ini menunjuk sebuah metode resolusi konflik yang berfokus pada transisi dari kekerasan ke perilaku yang tidak merusak dan membangun kembali hubungan antara musuh dalam konteks konflik etnis tertentu (Kriesberg, 2011). Transformasi konflik memang sangat sesuai dengan konflik etnis, yang merupakan konflik kompleks dan sistemik. Terlihat oleh beberapa orang sebagai metode pembangunan perdamaian “Bina Damai” tanpa kekerasan, ia bermaksud untuk berurusan dengan konflik berkepanjangan atau asimetris yang berulang kali menggantikan fase kekerasan dan perdamaian (Miall, 2004). Transformasi konflik menunjukkan bahwa konflik etnis berulang diciptakan oleh ketidakseimbangan kekuasaan dan keterputusan hubungan sosial, yang dapat diperbaiki melalui transformasi dan pembangunan kembali hubungan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menciptakan keberlanjutan damai dengan mengatasi akar penyebab kerusuhan dan dengan memberi kekuasaan kepada rakyat untuk mencapai perdamaian yang adil (Ryan, 2013). Ryan berpendapat bahwa jika konflik hanya dihentikan oleh intervensi tanpa transformasi, kemungkinan besar kekerasan akan terulang kembali. Transformasi konflik tidak melihat konflik secara fundamental buruk karena sebenarnya mereka adalah agen perubahan dalam masyarakat namun bertujuan untuk mengubah konflik secara bertahap untuk menghindari kekerasan. Ini juga bertujuan untuk menerapkan perdamaian yang lebih dari negatif, tidak adanya kekerasan; Ini juga mencari perdamaian positif, akhir kekerasan struktural untuk perdamaian yang tahan lama (Galtung, 1996).

Transformasi konflik didasarkan pada gagasan bahwa konflik itu rumit dan analisisnya memerlukan banyak lensa, yaitu analisis sistemik (Lederach, 2003). Konflik harus dipertimbangkan pada tiga tingkat yang berbeda. Tingkat pertama adalah situasi langsung, pecahnya kekerasan. Tingkat kedua berkaitan dengan masalah langsung namun mempertimbangkan akar penyebab masalah dan upaya segera temukan makna yang lebih dalam pada kekerasan. Tingkat ketiga adalah menganalisa kerangka kerja dan konteks permasalahan agar dapat menemukan solusi jangka panjang. Berdasarkan ketiga tingkat analisis ini, transformasi konflik memahami bahwa peacebuilding adalah proses bertahap yang bergantung pada penyatuan orang dan sumber daya dalam situasi tertentu (Lederach, 1995). Dengan kata lain, pendekatan *bottom up* harus mendapat hak istimewa atas intervensi *top down*.

Lederach mengusulkan empat bidang utama yang harus dipertimbangkan dalam transformasi konflik (Lederach, 1997):

- a. Perubahan pribadi menyangkut aspek emosional dan perseptual dari konflik. Biasanya, hal yang harus dilakukan oleh aktor perubahan harus dilakukan pada tingkat individu.
- b. Perubahan relasional adalah perubahan dalam interaksi pihak-pihak yang terkait dengan cara mereka memandang dan bertindak satu sama lain.
- c. Perubahan struktural melibatkan restrukturisasi pola dan pengambilan keputusan masyarakat. Ini bisa mencakup perubahan dalam tata kelola, proses pemilihan atau institusi.
- d. Perubahan budaya melibatkan modifikasi pola budaya untuk memahami dan merespons konflik. Hal ini dianggap sebagai bagian yang sangat penting dari transformasi konflik sejak "konflik sosial muncul dan berkembang berdasarkan makna dan interpretasi orang-orang yang terlibat dilekatkan pada tindakan dan kejadian ... Dari titik awal ini, konflik terhubung dengan makna, yang berarti pengetahuan, dan pengetahuan yang berakar pada budaya".

Menurut Lederach, proses perdamaian yang komprehensif harus dilakukan di beberapa tingkat untuk menciptakan strategi yang tepat dalam kerangka waktu yang tepat yang akan menantang struktur dan masalah yang ada dalam semua sistem konflik. Baik

tingkat akar rumput dan elit harus dilibatkan untuk menciptakan "realitas kohesif baru" (Galtung, 1996). Transformasi konflik, bekerja dalam jangka panjang, mengharuskan keterlibatan semua aktor hadir dalam konflik dan yang lebih penting lagi, pemberdayaan organisasi akar rumput seperti LSM lokal dan juga warga negara.

Transformasi konflik juga memerlukan pendekatan eksternal karena memberikan gambaran yang lebih baik mengenai konflik secara keseluruhan dan memungkinkan dilakukannya intervensi yang sesuai oleh mediator luar (Wils, et al., 2006). Perspektif luar dari konflik dan resolusinya merupakan komponen inti dari teori dan tidak selalu berarti bahwa transformasi konflik mengadopsi sikap Barat dalam perjalanan menuju berakhirnya konflik dan juga tidak berarti bahwa teori Lederach tidak memperhitungkan karakteristik budaya tentang konflik. Sebaliknya, pandangan eksternal tentang konflik ini menawarkan suatu analisis situasi yang lebih menyeluruh dengan memvisualisasikan semua sistem sekaligus dan hubungan antar mereka.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif eksploratif berdasarkan studi kasus ilustratif tunggal. Ini mengadopsi perspektif epistemologis konstruktivis mengenai pengetahuan. Ketika sampai pada studi konflik, narasi pluralitas dan subjektivitas peneliti yang tak terelakkan mempengaruhi cara memperoleh pengetahuan. Naratif berubah sesuai ingatan, pengalaman masa lalu, etika, ideologi dan bahkan gender sehingga konflik diciptakan oleh interaksi sosial dan hubungan. Ini relevan dengan penelitian ini karena transformasi konflik mengasumsikan bahwa perdamaian bergantung pada perubahan hubungan. Studi tentang konflik membutuhkan banyak perspektif dan kesadaran bahwa solusi untuk beberapa mungkin menjadi masalah bagi orang lain sehingga sulitnya untuk membangun proses perdamaian yang tahan lama.

Dari sudut pandang ontologis, penting untuk mengakui adanya fenomena yang tidak dapat diamati (Hollis and Smith, 1990). Dengan mengadopsi perspektif konstruktivis sosial, adalah mungkin untuk mempertimbangkan faktor irasional (Lapid, 1989) dalam konflik seperti kebencian, keluhan dan ketidakpercayaan yang sering hadir dalam urusan etnik. Konstruktivisme menunjukkan bahwa interaksi sosial karenanya ada secara independen dari persepsi namun dibentuk oleh faktor-faktor yang tidak dapat sepenuhnya dipahami oleh penalaran ilmiah dan memerlukan validitas sosial eksternal. Dari perspektif konstruktivis, penting untuk mengakui bahwa konflik tidak memiliki satu realitas namun dibangun oleh suatu sudut pandang, sejarah pribadi dan nasional, konteks dan faktor pribadi lainnya.

Oleh karena itu studi ini hanya dapat memberikan analisis subyektif mengenai konflik di Balinuraga dikarenakan laporan konflik telah dibangun melalui analisis wacana, media dan pandangan pribadi mengenai situasi tersebut. Apalagi penuh pengertian dari konflik di Balinuraga akan memerlukan wawancara pribadi yang menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang tidak dapat diamati ini.

## **2. Sumber Data**

Penelitian ini akan bergantung sepenuhnya pada data sekunder. Kerangka teoritis telah mengandalkan artikel akademis dan buku serta buku pegangan yang lebih praktis mengenai potensi penerapan analisis sistemik terhadap konflik diterbitkan oleh Berghof Foundation. Penting untuk ditunjukkan bahwa konsep yang dibahas sepanjang tesis ini dalam kerangka teoretis telah dikembangkan berdasarkan konsep dan pemahaman yang berpusat pada Barat. Harus dipertimbangkan bahwa pendekatan teoretis Lederach bisa jadi tidak berlaku lagi di lingkungan non-Barat. Namun dia menyadari adanya perbedaan lintas budaya dan mengakui perlunya menyesuaikan diri dengan konflik yang dihadapi dalam "Mempersiapkan Perdamaian: Transformasi Konflik di Seluruh Budaya" (Lederach, 2003). Mengingat fakta bahwa peristiwa di Balinuraga agak baru dan belum dipelajari secara ekstensif oleh para ilmuwan, kebanyakan menggunakan literatur subjektif akademis, yaitu artikel surat kabar, buku pegangan praktis dan laporan dari LSM. Hanya sumber yang telah diterbitkan pada tahun 2012 ketika kekerasan telah selesai diperiksa.

Artikel berita berasal dari media online dan semuanya telah dipublikasikan Oleh karena itu dapat dikurangkan bahwa mereka dipersembahkan untuk publik dan kemungkinan besar telah ditulis oleh wartawan daerah yang berada di luar konflik. Hal ini dapat mempengaruhi kenyataan sosial yang disajikan dalam artikel tersebut. Sebagai contoh, LSM atau media nasional, regional, dan lokal cenderung berfokus pada situasi kemanusiaan dan oleh karena itu menempatkan kelompok etnis dalam peran Korban sedangkan berita nasional atau sekutu negara akan memiliki wacana yang lebih mendukung pemerintah.

Dua sumber menonjol: Lampung Post dan Radar Lampung. Keduanya adalah organisasi independen dan swasta yang berada di Bandar Lampung dan mempublikasikan laporan dalam bahasa Indonesia. Misi mereka adalah untuk menyebarkan berita yang tidak memihak kepada publik. Sumber-sumber tertentu dipilih karena mereka memberi wawasan tentang situasi di Balinuraga yang berbeda dari yang dapat ditawarkan oleh media lainnya. Namun, informasi yang diberikan oleh materi tersebut akan diperiksa secara hati-hati dengan sumber lain untuk menghindari subjektivitas yang berlebihan.

### 3. Metode Analisis

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, konflik adalah sistem kompleks yang terdiri dari aktor, peristiwa, hubungan dan faktor yang mempengaruhi seperti ekonomi, geografi atau sejarah sehingga pendekatan analisis sistemik terdiri dari dua bagian; salah satunya adalah pemetaan konflik, atau analisis konflik itu sendiri, dan yang kedua menggunakan analisis ini untuk menyusun strategi proses transformasi. Pemahaman konflik yang lebih baik memerlukan analisis mendalam untuk mencakup kompleksitas konflik yang berkepanjangan. Ropers, direktur program di Berghof Foundation, menunjuk bahwa karakteristik spesifik suatu sistem adalah keseluruhannya lebih dari jumlah bagiannya (Ropers, 2008). Ini berarti bahwa berbagai bagian disatukan menghasilkan efek yang berbeda dari pada yang akan dilakukan sendiri karena cara mereka berinteraksi. Galtung menambahkan bahwa konflik adalah "sesuatu yang selalu berubah, dinamis" (Galtung, 1996). Oleh karena itu, mereka memerlukan analisis sistemik, sebuah metode yang menekankan pentingnya hubungan dan efek yang dimiliki masing-masing pihak terhadap semua subsistem yang berbeda.

Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan penggunaan pendekatan analisis sistem terhadap transformasi konflik. Pemikiran sistemik melihat pola pemetaan perubahan dan saling ketergantungan dan memberi penekanan khusus pada agen manusia dalam menentukannya dinamika dan perkembangan konflik (Ropers, 2008). Karena pentingnya memberikan hubungan, analisis konflik sistemik dapat memahami faktor "irasional" dalam konflik seperti kebencian dan ketidakpercayaan. Begitu hubungan, dinamika, masalah dan pendorong dan hambatan untuk perubahan telah diidentifikasi, proses perubahan sosial yang inklusif dan komprehensif dapat disusun.

Pendekatan ini menegaskan bahwa transformasi konflik harus mencakup unsur-unsur berikut (Wils, et al., 2006):

- a. Analisis konflik sistemik dan pemantauan konflik melalui observasi. Ini harus melihat hubungan intra dan antar kelompok dan saling ketergantungan.
- b. Perencanaan strategis untuk intervensi yang memobilisasi dan melibatkan semua pemangku kepentingan yang berbeda dalam konflik. Ini melibatkan bekerja di

dalam sistem dan oleh karena itu membutuhkan komitmen institusi lokal, LSM, organisasi akar rumput dan aktor masyarakat sipil lainnya yang hadir di lapangan.

- c. Bantuan untuk langkah-langkah perdamaian yang berkelanjutan seperti rekonsiliasi, tata pemerintahan yang baik dan kesepakatan damai.

Ada empat keuntungan utama mendekati konflik secara sistemik (Wils, et al., 2006):

- a. Baik pelaku internal maupun eksternal mampu memvisualisasikan konflik dengan lebih baik. Pendekatan sistemik menyoroti batas-batas konflik dan juga dinamika konflik di dalamnya. Ini memberikan wawasan baru tentang konflik dengan mempertimbangkan dinamika dan faktor tak terlihat lainnya seperti kebutuhan, keluhan, kepentingan dan peran semua aktor yang terlibat. Dengan demikian mengidentifikasi struktur dasar konflik, membuatnya lebih transparan dan tidak rumit memahami.
- b. Pemahaman sistemik terhadap konflik membuat intervensi menjadi lebih mudah. Ini menunjukkan setiap aktor perannya, kontribusi dan potensi tindakannya dalam pembangunan perdamaian. Oleh karena itu, proses perdamaian lebih fleksibel karena komunikasi yang lebih baik.
- c. Ini menyediakan kerangka kerja yang baik untuk menyiapkan intervensi yang efektif.
- d. Pendekatan sistemik memungkinkan inklusivitas semua pihak dalam konflik, sehingga membatasi transformasi konflik yang tidak adil. Ini juga mendorong jaringan dan pendekatan bertingkat untuk penyelesaian konflik yang membuat proses perdamaian didukung struktur lebih kuat.

Metode analisis konflik penelitian ini akan dilakukan pada dua tingkat: makro dan tingkat meso. Analisis dua tingkat ini memungkinkan untuk memberikan yang lebih jelas dan lebih banyak lagi laporan komprehensif tentang konflik untuk menerapkan secara tepat pendekatan sistemik terhadap intervensi konflik. Konflik tersebut akan dianalisis pada dua tingkat yang berbeda (Paffenholz, 2004):

- a. Analisis tingkat makro dirancang untuk mendapatkan pandangan umum tentang konflik di negara bagian atau tingkat internasional, tergantung pada apakah konflik tersebut bersifat sipil atau internasional. Analisis makro terhadap konflik

membutuhkan pemahaman lima aspek menyeluruh, yaitu sejarah konflik, aktor konflik, konteks konflik, isu konflik dan dinamika konflik (Wehr, 1979). Pemetaan efektif suatu Konflik pada tingkat makro melibatkan analisis kualitatif tentang hubungan, agensi dan struktur antara kelima aspek ini melalui informasi yang dikumpulkan. Menurut Wehr (1979), suatu analisis mendalam mengenai nilai, kebutuhan dan kepentingan pihak-pihak konflik yang lebih dalam dapat mempermudah kompleksitas konflik untuk praktisi.

- b. Tingkat meso berfokus pada pembagian negara. Ini bertujuan untuk menilai kebutuhan penduduk di wilayah geografis tertentu, di mana yang paling banyak kelompok terpinggirkan dan di mana transformasi dan intervensi konflik sangat dibutuhkan. Ini memerlukan identifikasi pola dasar konflik.

Ini sangat berguna bagi LSM yang bekerja dalam skala yang lebih kecil. Analisis menggunakan metode yang sama seperti tingkat makro satu dan lagi, analisis struktur dan agensi antar aktor diperlukan. Teori kompleksitas dan teori transformasi konflik berfokus pada hubungan antar agen. Teori transformasi konflik menyoroti agen konstruktif dan destruktif perubahan, yaitu partai global, regional, negara bagian, konflik dan tingkat elit atau individu (Dudouet, 2006).

Setelah konflik telah dianalisis, rencana transformasi sistemik harus dirancang. Intervensi tersebut akan berusaha menghasilkan solusi berkelanjutan yang kreatif, dapat dicapai dan inovatif terhadap konflik melalui tindakan multi level oleh semua pihak pihak yang terlibat. Ada tiga langkah utama yang harus dilakukan untuk mengubah konflik: (1) perencanaan strategis mengenai intervensi, (2) mobilisasi agen-agen untuk perubahan penuh damai (3) keterlibatan para pemangku kepentingan. Tabel berikut menjelaskan apa yang masing-masing langkah berikut:

### **Langkah 1**

- a. Mengidentifikasi dan menyesuaikan dengan arketipe konflik karena menentukan dinamika dan hubungan antara para pihak dan potensi reaksi mereka terhadap langkah-langkah Bina Damai (perlawanan atau penerimaan)

- b. Mengidentifikasi penyebab langsung mengenai kekerasan untuk menghentikan permusuhan dalam isu transformasi
- c. Mengidentifikasi isu utama untuk menerapkan perubahan jangka panjang dan transformasi struktural
- d. Mengidentifikasi titik masuk untuk intervensi, yaitu jangka waktu dan saluran yang sesuai

## **Langkah 2**

Mengidentifikasi aktor penting dari konflik dan potensi pengungkitannya (pendorong perubahan atau spoiler yang dapat mencegah transformasi). Hal ini memungkinkan untuk membayangkan intervensi pada berbagai tingkatan

## **Langkah 3**

Logistik intervensi: mengidentifikasi personel, dana dan mekanisme tindak lanjut dan pemantauan yang tepat

## **4. Batasan Konsep**

**Konflik yang berkepanjangan/berlarut-larut:** seperti setiap jenis konflik, sulit untuk memberikan definisi konflik yang berkepanjangan/berlarut-larut. Untuk tujuan disertasinya ini, definisi Azar akan digunakan: konflik sosial yang berkepanjangan ditandai dengan "berkepanjangan dan seringkali penggunaan kekerasan oleh kelompok komunal untuk kebutuhan dasar seperti keamanan, pengakuan dan penerimaan, akses yang adil terhadap institusi politik dan partisipasi ekonomi" (Ramsbotham, et al., 2005).

***Peace building:*** "*Peace building* melibatkan serangkaian tindakan yang ditargetkan untuk mengurangi risiko terjerembab atau terjepit dalam konflik dengan memperkuat kapasitas nasional di semua tingkat untuk pengelolaan konflik, dan meletakkan fondasi untuk pengembangan perdamaian dan berkelanjutan. Strategi pembangunan perdamaian harus koheren dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik negara yang bersangkutan, berdasarkan pada kepemilikan nasional, dan harus terdiri dari serangkaian kegiatan yang diprioritaskan secara cermat, diurutkan, dan oleh karena itu relatif sempit yang ditujukan untuk mencapai tujuan di atas" (United Nations, 2007).

**Resolusi konflik:** Resolusi konflik mengacu pada seperangkat metode yang dirancang untuk mengakhiri konflik secara permanen dengan menangani masalah dan kepentingan masing-masing pihak sampai mereka puas dengan hasilnya. Diamond mendefinisikan resolusi sebagai upaya untuk "menemukan, mengidentifikasi dan menyelesaikan akar penyebab konflik yang mendasar" (Diamond and McDonald, 1996). Oleh karena itu, resolusi konflik berfokus pada pemecahan masalah dan negosiasi untuk mendapatkan kedamaian negatif. Mengatasi kebutuhan, minat dan keluhan dua pihak adalah tugas yang sangat sulit dan hampir tidak mungkin menerapkan resolusi pada perselisihan banyak pihak. Resolusi tampaknya tidak sesuai untuk menghadapi konflik yang sangat kompleks seperti perlawanan/pertempuran etnis (Mu'id, 2003). Tampaknya teori yang lebih tepat untuk mempelajari zero sum perang yang berakhir dengan pemenang dan pecundang bukan konflik sosial bertingkat. Memang, mengingat kegagalan pembangunan perdamaian pada tahun 1990-an, terutama di Rwanda dan Bosnia, tampaknya resolusi konflik bukan lagi kerangka kerja yang tepat untuk menangani konflik modern.

Selain itu, 'resolusi', seperti yang ditunjukkan oleh Lederach (1995), menekankan perlunya mengakhiri konflik. Terminologi semacam itu menyoroti rasa urgensi dan karena itu mendorong perbaikan cepat yang dangkal ke penyebab langsung konflik yang sebenarnya berakar kuat di masyarakat dan disebabkan oleh masalah yang kompleks. Resolusi konflik menyiratkan bahwa konflik sebaiknya dipecahkan atau tidak diatasi (Galtung, 1996).

**Kelompok etnis:** Untuk mempelajari konflik etnis, diperlukan suatu definisi kelompok etnis. PBB mendefinisikan kelompok etnis sebagai "diidentifikasi oleh etnisitas negara (yaitu, negara atau wilayah asalnya, berbeda dari kewarganegaraan atau negara dengan kewarganegaraan legal), ras, warna kulit, bahasa, agama, kebiasaan berpakaian atau makan, suku atau berbagai kombinasi karakteristik ini" (United Nations, 2013).

## **BAB IV**

### **GAMBARAN DAERAH PENELITIAN**

#### **1. Kabupaten Lampung Selatan**

Wilayah Kabupaten Lampung Selatan terletak antara 105° 14' sampai dengan 105° 45' Bujur Timur dan 5° 15' sampai dengan 6° Lintang Selatan. Mengingat letak yang demikian ini, daerah Kabupaten Lampung Selatan seperti halnya daerah – daerah lain di Indonesia merupakan daerah tropis. Kabupaten Lampung Selatan bagian selatan meruncing dan mempunyai sebuah teluk besar yaitu Teluk Lampung. Di Teluk Lampung terletak sebuah pelabuhan yaitu Pelabuhan Panjang, dimana kapal-kapal dalam luar negeri dapat merapat. Secara umum , pelabuhan ini merupakan faktor yang sangat penting bagi kegiatan ekonomi penduduk Lampung. Sejak tahun 1982, Pelabuhan Panjang termasuk dalam wilayah Kota Bandar Lampung.

Secara administrasi wilayah Kabupaten Lampung Selatan mempunyai batas-batas. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur; sebelah Selatan dengan Selat Sunda; sebelah Barat dengan Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran, dan sebelah Timur dengan Laut Jawa.

Jumlah Penduduknya sebesar 912.490 jiwa, yang terdiri dari 470.303 jiwa laki-laki dan 442.187 perempuan. Sex ratio penduduk atau perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan 106,36 yang berarti bahwa setiap 100 jiwa perempuan terdapat 106 laki-laki. Penduduk yang paling banyak di Kecamatan Natar dan yang paling sedikit di Kecamatan Bakauheni.

Penduduk Kabupaten Lampung Selatan secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu penduduk asli Lampung dan pendatang. Penduduk asli Lampung, yaitu etnik Lampung Peminggir, umumnya berkediaman di sepanjang pesisir pantai, seperti di Kecamatan Penengahan, Kalianda, dan Katibung.

Penduduknya terdiri dari beragam etnik, seperti Jawa, Sunda, Bali, Semendo, Banten dan lain-lain. Dari semua etnik tersebut, yang terbesar berasal dari pulau Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Yogyakarta), dan Bali. Hal ini terjadi karena program kolonisasi dan transmigrasi, disamping karena migrasi swakarsa dan

spontan.

1. Program Kolonisasi pertama dari pulau Jawa dilakukan oleh pemerintah Kolonial Belanda pada November 1905. Lokasinya di Kecamatan Gedung Tataan dengan membuka desa baru, yaitu Desa Bagelen, berjumlah 155 Kepala Keluarga (KK), yang dipimpin oleh H.G. Heyting.
2. Kolonisasi kedua di daerah Teluk Semangka, Kecamatan Wonosobo dan Kota Agung pada tahun 1921 dan 1922 sebanyak 6.021 jiwa yang dipimpin oleh W.C. Schalk Wijk.
3. Kolonisasi ketiga dicoba sistem spontan di daerah Kota Agung dan Gedung Tataan pada tahun 1923 – 1927 berjumlah 1053 jiwa.
4. Selanjutnya kolonisasi sistem sisipan yaitu yang disisipkan pada penduduk setempat, tidak dengan membuka lahan baru, dan sebagai obyeknya adalah di sekitar Kecamatan Kalianda yang dilaksanakan pada tahun 1934.
5. Pada tahun 1935 – 1939 dilakukan lagi kolonisasi dengan sistem baru yaitu Bedol Desa, yang ditempatkan di daerah Kecamatan Talang Padang sekitar 27.816 jiwa berasal dari Kediri.
6. Pada tahun 1950 – 1955 sebanyak 5.491 KK ditempatkan di Lampung Selatan. Tahun 1955 – 1969 sebanyak 5.333 KK ditempatkan di Kecamatan Sidomulyo, Palas, Penengahan, Tanjungan dan Balau Kedaton. Pada tahun 1974, di Kecamatan Palas dan Penengahan dilakukan transmigrasi sisipan sebanyak 732 KK.

Dilihat dari adat-istiadatnya, etnik asli Lampung memiliki struktur adat tersendiri, yang secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu masyarakat adat Lampung *Peminggir* atau *Saibatin* dan *Pepadun*. Masyarakat adat *Peminggir* dulunya banyak tinggal di wilayah pesisir pantai sebagai etnik mayoritas. Kemudian masyarakat adat Lampung *Pepadun* dulunya banyak tinggal di pedalaman yang jumlahnya lebih sedikit.

Dilihat dari aspek ketegakerjaan, jumlah keluarga pra sejahtera 243.199 KK, pra sejahtera I sebesar 108.041 KK, sejahtera I sebesar 57.009 KK, sejahtera II sebesar 50.080 KK, sejahtera III sebesar 26.081 KK, dan sejahtera III plus sebesar 1.988 KK. Program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2010 dapat dinilai cukup berhasil. Ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah akseptor aktif, menjadi

130.551 orang, naik dibandingkan tahun 2009 sebanyak 124.996 orang. Pada umumnya mereka menggunakan suntik sebagai alat untuk kontrasepsi. Jumlah akseptor KB baru di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2010 mencapai 58.096 orang.

Di Kabupaten Lampung Selatan terdapat 71 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 26.828 orang. Tenaga kerja yang dimaksud terdiri dari 21.268 orang WNI laki-laki, 5.546 orang WNI perempuan, dan 14 orang WNA laki-laki. Rata-rata besarnya kebutuhan minimum per bulan di Kabupaten Lampung Selatan meningkat. Banyaknya pasar kerja yang terdaftar sebesar 4.638 orang dengan rincian 2.166 laki-laki dan 2.472 perempuan. Sedangkan permintaan tenaga kerja sebanyak 1.469 orang, laki-laki 337 orang dan perempuan 1.132 orang.

## **2. Daerah Rawan Konflik Sosial**

Kondisi daerah rawan konflik dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sosial, politik, ekonomi, keberagaman etnik, keberagaman agama.

*Pertama*, kondisi sosial di wilayah konflik kurang harmonis, terbukti adanya konflik dan resolusi tidak terbangun dengan baik. Selain itu juga sering terjadi konflik beruntun karena balas dendam dan adanya kecemburuan sosial etnik asli Lampung terhadap pendatang.

*Kedua*, kondisi sosial politiknya cukup kondusif, namun dapat berubah jika ada kepentingan politik yang melibatkan masyarakat seperti penghasutan untuk melawan pemerintah. Pada sisi lain kebijakan pemerintah yang dianggap kurang peduli terhadap aspirasi masyarakat bawah, tidak kompeten dalam merespon keinginan dari kelompok identitas, dan rentan terhadap perselisihan antar para elit, cenderung menciptakan keresahan dan ketidakpuasan masyarakat. Kondisi ini dapat memicu konflik, sehingga perlu waspada dan antisipasi dini.

*Ketiga*, dilihat dari kondisi sosial-ekonomi terdapat perbedaan antara masyarakat yang tinggal di pinggiran kota dengan yang agak jauh dari kota, sehingga sangat tinggi sensitifitasnya terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi. Kondisi ini dapat menimbulkan prasangka buruk dan dapat memicu terjadinya konflik. Masyarakat asli Lampung merasa

kondisi ekonominya lebih lemah dibanding pendatang. Di samping itu, ada kelompok yang mempertahankan adat kebiasaannya dan tidak mau berbaur dengan lingkungan baru.

*Keempat*, penduduknya terdiri dari beragam etnik. Etnik asli Lampung cenderung hidup dalam komunitasnya, dan juga etnik pendatang tinggal secara berkelompok dalam suatu komunitas Dusun dan Desa, seperti Desa Balinuraga (Kampung Bali).

*Kelima*, dilihat dari keberagam agama, yang beragam agama Islam sebanyak 873.654 jiwa, Kristen 12.829 jiwa, Khatolik 5.598 jiwa, Hindu 15.014 jiwa, Budha 1.116 jiwa, Khong Hu Chu 34 jiwa, dan lainnya 129 jiwa. Namun demikian, konflik-konflik sosial yang terjadi selama ini bukan disebabkan oleh keragaman agama.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **V.1. Hasil Penelitian**

##### **1. Kecamatan Way Panji dan Kalianda**

Kecamatan Way Panji sebagian besar penduduk berasal dari etnik Bali, Jawa, dan Banten tersebar di 4 (empat) desa, salah satunya adalah **Desa Balinuraga** (desa tempat etnik Bali bermukim). Sedangkan, Kecamatan Kalianda sebagian besar penduduk merupakan etnik Lampung yang telah tinggal sebelum etnik Bali datang ke Lampung. Etnik Lampung tinggal tersebar di semua desa-desa yang ada di Kecamatan Kalianda, salah satunya **Desa Agom**. Etnik lain yang tinggal di desa-desa lainnya di Kecamatan Kalianda adalah Jawa, Sunda, Banten, dan Semendo.

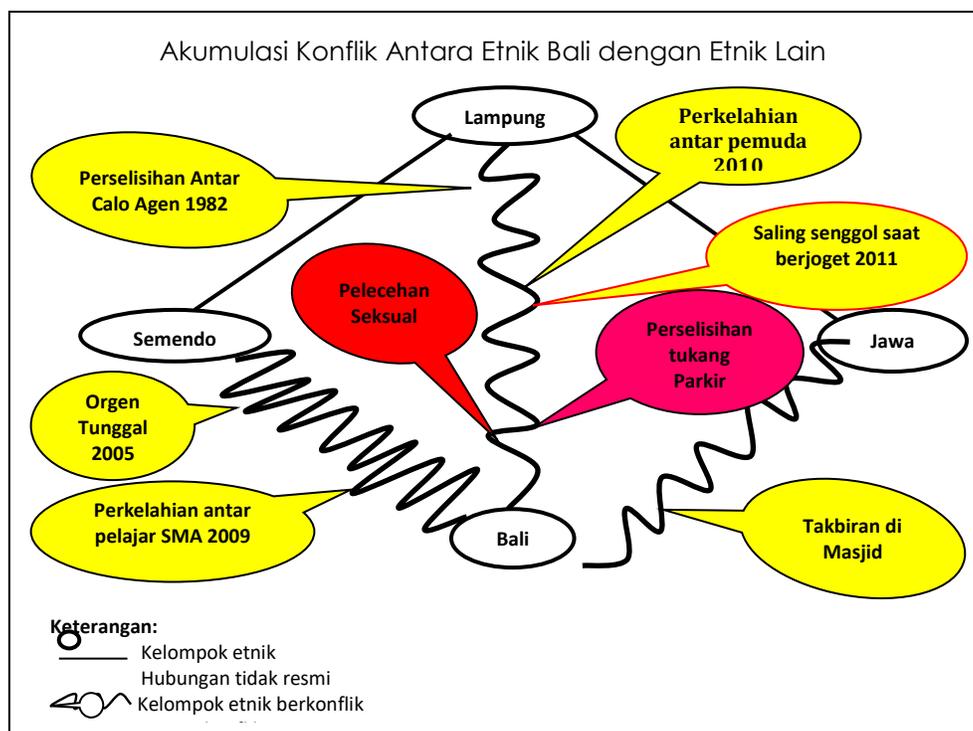
Penduduk di 2 (dua) kecamatan dapat dikatakan beragam berdasarkan etnik. Ini cerminan dari suatu masyarakat majemuk (*plural*). Kemajemukan suatu penduduk juga dapat diklasifikasi ke dalam 2 (dua) konfigurasi kategori, yaitu mayoritas dominan, dan fragmentasi. Etnik Lampung merupakan etnik mayoritas dominan karena menganggap atau merasa sebagai penduduk asli dan memiliki kontrol atau kekuasaan untuk mengontrol serta jumlahnya lebih banyak dibanding etnik lainnya. Di samping itu, etnik-etnik di kedua kecamatan, hidup dan tinggal meskipun tidak semuanya, terfragmentasi. Terlihat jelas dari pemukiman etnik Lampung dan Bali yang terfragmentasi dari pemukiman etnik lainnya. Etnik Jawa, Banten juga mukim bersama etnik Jawa dan Banten lainnya, namun banyak juga etnik Jawa dan Banten lainnya yang juga mukim di perkampungan etnik Lampung. Keadaan ini tidak berlaku bagi etnik Bali. Keadaan mayoritas dominan dan permukiman yang terfragmentasi menjadi kondisi rentan terjadinya konflik sosial.

##### **2. Konflik Balinuraga dan Agom**

Meskipun bukan yang pertama kali, namun konflik sosial yang terjadi pada tanggal 27- 29 Oktober 2012 yang sering disebut dengan “Konflik Balinuraga – Agom” atau Konflik Way Panji” merupakan konflik sosial yang sempat menjadi perhatian nasional bahkan juga menjadi perhatian internasional. Konflik yang terjadi di Desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung bermula – dipicu –

dengan adanya dugaan kejadian pelecehan seksual yang dilakukan pemuda Bali terhadap remaja perempuan etnik Lampung. Sebelum konflik bereskalasi, ada upaya dialog dan atau musyawarah yang dilakukan oleh para orang tua, tokoh pemuda, para kepala desa antara kedua pihak berkonflik untuk berdamai namun tidak berhasil. Hal ini dikarenakan adanya berbagai latar belakang masalah mendasar lainnya yang telah membuat kegeraman dan keresahan yang telah ada dalam jangka waktu cukup lama, maka terjadi penyerangan massa etnik Lampung yang berasal dari berbagai wilayah ke Desa Balinuraga.

Konflik ini akhirnya berubah menjadi konflik bernuansa etnik - antara kelompok etnik Bali dengan kelompok etnik Lampung - seiring dengan eskalasi konflik - isu membias tidak hanya bernuansa etnik (juga agama). Pada puncaknya, konflik ini tidak hanya melibatkan dua pihak saja namun melibatkan etnik Lampung lain dari berbagai daerah seperti Jabung, Asahan, Lampung Tengah, Metro, Lampung Utara, dan etnik Lampung dari Provinsi Banten. Selain itu, ada beberapa etnik lain (terutama etnik Jawa dan Semendo) yang juga turut serta membantu etnik Lampung. Hal ini terjadi karena akumulasi kekesalan etnik pendatang yang merasa pernah berseteru dengan orang Bali (Lihat Gambar 1).



## Gambar 1. Pemetaan Kejadian dan Isu Konflik

Berdasarkan Gambar 1, dapat diterangkan bahwa konflik kekerasan Balinuraga sebenarnya bukan merupakan konflik yang berdiri sendiri, tetapi didahului oleh konflik-konflik yang terjadi sebelumnya (konflik akumulatif) dengan intensitas dan eskalasi semakin tinggi dan meluas. Adapun konflik kekerasan yang terjadi sebelumnya, yaitu mulai tahun 1982 hingga 2012 dikenal dengan konflik Marga Catur (terjadi di Desa Marga Catur, etnik Jawa dan Bali) dan konflik Napal (terjadi di Desa Dusun Napal, etnik Lampung dan Bali), serta konflik dengan etnik Semendo (etnik Semendo dan Bali).

Presentasi etnik Bali dalam pemetaan konflik dapat digambarkan sebagai *common enemy* etnik Lampung, Jawa, dan Semendo. Ada kesamaan kebutuhan (rasa aman, balas dendam, mengobati sakit hati) dan prasangka ketiga etnik terkait keberadaan etnik Bali. Kesamaan kebutuhan dan prasangka ini lah yang dapat menyatukan mereka dalam suatu *in-group*. Prasangka *in-group* terhadap *out-group* bersumber dari timbulnya kesadaran terhadap sasaran prasangka<sup>4</sup>, yakni kesadaran bahwa (1) kelompok lain berbeda latar belakang kebudayaan serta mental; (2) tidak mampu beradaptasi; (3) selalu terlibat dalam tindakan negative; dan (4) dapat mengancam stabilitas sosial dan ekonomi.

### 3. Anatomi Konflik

Konflik bermula karena pelecehan seksual oleh pemuda desa Balinuraga kepada etnis Lampung.

#### a. Eskalasi konflik

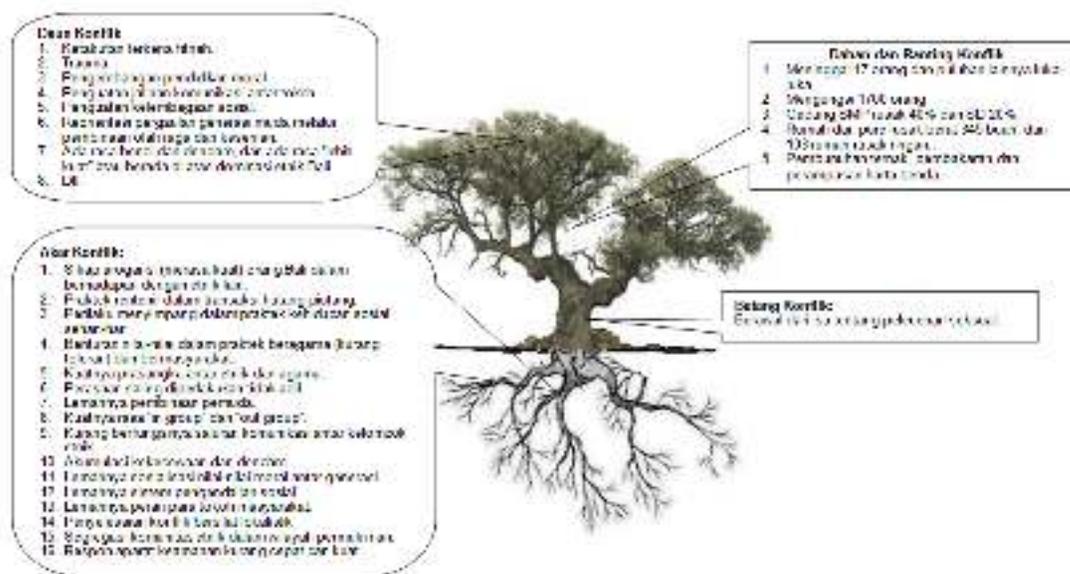
Dialog antara kedua pihak berkonflik tidak berhasil, dan karena adanya berbagai latar belakang masalah mendasar lainnya membuat kegeraman dan keresahan yang telah ada dalam jangka waktu cukup lama, terjadi penyerangan massa etnis Lampung yang berasal dari berbagai wilayah ke desa Balinuraga

#### b. Hubungan antar aktor

Pada puncaknya, konflik ini tidak hanya melibatkan dua pihak saja namun melibatkan etnik Lampung lain dari berbagai daerah seperti Jabung, Asahan, Lampung

Tengah, Metro, Lampung Utara, dan etnik Lampung dari Provinsi Banten. Selain itu, ada beberapa etnik lain (terutama etnik Jawa dan Semendo) yang juga turut serta membantu orang Lampung. Hal ini terjadi karena akumulasi kekesalan etnik pendatang yang merasa pernah berseteru dengan orang Bali.

#### 4. Pemetaan Sebab – Akibat Konflik Balinuraga – Agom



Gambar 2. Pohon Masalah Konflik Balinuraga – Agom

#### 5. Akibat Konflik

Konflik Balinuraga – Agom merupakan gambaran konflik yang dapat dijelaskan dengan menggunakan Model Konflik Realistis<sup>6</sup> - *Realistic Conflict Theory* - yang dikembangkan oleh Campbell. Konflik antar kelompok terjadi karena ancaman nyata ditambah ancaman lain yang tidak nyata yang diterima oleh setiap kelompok etnik yang terlibat dalam konflik. Setiap kelompok yang bertikai mengalami tekanan, dan tekanan mempengaruhi struktur sosial, aktivitas *in-group*, dan aktivitas individual. Akumulasi dari tekanan akan melahirkan etnosentrisme, makin kuatnya solidaritas *in-group*, yang dapat mendorong frekuensi dan kualitas dari kekerasan antar kelompok. Konsekuensi penggunaan kekerasan antar kelompok tentunya terjadi pengrusakan, penjarahan, kesakitan, bahkan kematian individu yang bertikai.

Akibat penyerangan atau konflik Balinuraga – Agom mengakibatkan sebuah gedung SMP rusak 40%; sebuah gedung SD rusak 20%; tempat ibadah berupa 1 (satu) unit Pura milik Banjar rusak parah; rumah warga berjumlah 375 rumah beserta pura; korban meninggal 9 orang dan puluhan orang Bali serta 4 orang Lampung luka-luka.

## **6. Analisis Konflik Tingkat Meso**

Analisis tingkat meso terlihat lebih khusus pada kelompok-kelompok etnis elit desa, pemerintah desa, kecamatan, kabupaten yang menjadi pusat konflik. Ini bertujuan untuk menilai kebutuhan, minat dan posisi spesifik mereka. Tingkat meso memberikan wawasan yang lebih baik tentang tindakan apa yang bisa diambil di tingkat lokal untuk mengubah konflik.

Permukiman etnis Bali di Desa Balinuraga telah ada sejak transmigrasi swakarsa etnis Bali ke Lampung, namun hingga saat ini mereka masih berkumpul menjadi satu (terkesan eksklusif) dan perlakuan pemerintah kecamatan juga tidak terlalu berpihak pada etnis Bali. Penolakan etnis-etnis lain, termasuk etnis Lampung, untuk mengakui mereka sebagai warganya sendiri telah semakin menciptakan frustrasi dan kemarahan di kalangan etnis Lampung. Meskipun, etnis Bali mendefinisikan identitasnya sebagai warga Lampung dengan etnis Bali, yang beragama Hindu dan, menurut mereka, adalah warga Lampung yang sama dengan etnis lainnya, serta wilayah yang telah mereka tempati telah cukup lama. Saat ini, hadir di seluruh Provinsi Lampung karena banyaknya jumlah orang Bali yang berpindah (transmigrasi swakarsa) dengan tujuan mengubah hidup dan menghindari bencana alam.

Bentrokan baru-baru ini di Desa Agom, memiliki penyebab yang lebih langsung: pemerkosaan dan Pembunuhan. Orang-orang Bali dianiaya dan dijarah oleh penduduk lokal. Lebih buruk lagi, gerakan anti-Bali dipimpin oleh tokoh-tokoh masyarakat di wilayah tersebut telah mendorong peristiwa konflik yang berulang-ulang. Etnis Bali yang terpinggirkan tampaknya tidak memiliki advokat, yang dapat menjelaskan kurangnya upaya untuk menemukan solusi konflik yang berkepanjangan ini.

Sementara sejumlah perdamaian telah diselenggarakan untuk menghentikan kekerasan antara etnis Bali dan etnis Lampung serta etnis lokal lainnya. Oleh karena itu,

masalahnya telah mengambil dimensi nasional, meningkatkan kepedulian masyarakat nasional dan LSM hak asasi manusia. Kredibilitas daerah sangat terancam oleh masalah ini dan masyarakat nasional telah diminta untuk menegakkan tanggung jawabnya untuk melindungi karena jumlah korban, pengungsi yang cukup besar. Mereka khawatir tentang situasi kemanusiaan di Balinuraga yang dikatakan 'mengerikan' karena banyak TNI, Polri, dan LSM menyerukan tindakan segera. Para TNI, Polri melaporkan bahwa prioritasnya adalah evakuasi, mengungsi korban, tempat mukim, logistik, dan penyediaan air minum serta kesehatan pengungsi. Pemerintah daerah bersama-sama Polri dan TNI berperan untuk mengupayakan perdamaian dan juga rehabilitasi korban serta rekonstruksi bangunan-bangunan yang rusak.

## **7. Pendekatan Sistemik terhadap Transformasi Konflik**

Analisis konflik telah memberikan gambaran yang lebih jelas tentang berbagai pemangku kepentingan dari sistem konflik serta konteks di mana kekerasan berkembang. Bagian ini bertujuan untuk mengusulkan kemungkinan penerapan strategi transformasi konflik yang diberikan fitur-fitur konflik yang diartikulasikan sebelumnya.

Mengikuti Wils et al. tiga langkah untuk merancang strategi yang efektif untuk intervensi, proses transformasi yang diusulkan akan terungkap sebagai berikut: penilaian tentang apa yang harus diubah dalam sistem untuk mengusulkan solusi kreatif untuk perdamaian yang berkelanjutan, isu-isu transformasi dan perubahan struktural, evaluasi alat-alat diperlukan untuk mengimplementasikan perubahan dan mengubah aturan dan budaya, serta akhirnya saran dari sumber daya yang akan dialokasikan dan cara mereka untuk mencapai pihak-pihak konflik.

## **8. Perencanaan Strategis untuk Transformasi Konflik Sistemik**

Konflik di Balinuraga dicirikan oleh keseimbangan kekuasaan yang rapuh antara dua atau lebih kelompok yang merasa terancam satu sama lain, ciri khas dari eksklusi dan eskalasi arketipe konflik. Oleh karena itu di tangan pihak ketiga, intervener, untuk

menghasilkan solusi yang kreatif dan inklusif yang relevan dengan masalah ini dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam rangka untuk mengurangi konflik. Rupsinghe menyarankan penggunaan intervensi multi-track, campuran tindakan akar rumput, dan aliansi aktor masyarakat sipil.

Masalah utama dalam konflik tampaknya adalah pemerintah daerah yang abai. Dengan politik lokal yang masih memegang sejumlah besar kekuasaan atas pengambilan keputusan politik, peradilan dan militer, kelompok etnis tidak bisa merasa aman. Reformasi konstitusional yang mendalam, transparan dan jujur sangat penting untuk mengurangi politik lokal, memperkuat institusi serta aturan hukum dan menerapkan proses pengambilan keputusan bottom up untuk memastikan pengambilan keputusan yang adil dan merata di tingkat lokal. Menurut Grofman dan Stockwell, pembagian kekuasaan institusi adalah solusinya. Ini memang akan memuaskan tuntutan otonomi yang meningkat dari kelompok-kelompok etnis.

Pihak berwenang setempat akan lebih siap untuk menangani masalah hak atas tanah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kelompok etnis. Selain itu, penguatan politik lokal menciptakan kepercayaan pada komunitas yang lebih kecil dan memberi mereka rasa pengakuan yang berpartisipasi dalam mengubah perilaku, persepsi, dan sikap. Pemerintahan yang bermasalah tidak mudah diubah karena hambatan yang ada untuk berubah. Perlawanan terjadi ketika pihak-pihak yang berselisih enggan untuk proses perubahan, karena takut akan hal yang tidak diketahui, takut kehilangan kekuasaan, keamanan atau identitas.

Ada beberapa titik masuk ke intervensi sistemik pihak ketiga mengingat bahwa reformasi harus dilakukan:

1. Titik masuk masyarakat sipil: Menciptakan jaringan organisasi akar rumput yang akan dikaitkan dan mungkin dibiayai oleh organisasi donor dapat memberikan titik masuk yang kuat dan transparan ke daerah tersebut. Karena semua tindakan akan diambil dan dilaksanakan dari tingkat lokal. Namun mekanisme harus diberlakukan agar tidak ada penyalahgunaan dari organisasi yang lebih besar. Masyarakat sipil dapat memiliki peran penting dalam mendukung berakhirnya permusuhan: itu adalah titik masuk langsung.

2. Titik masuk politik: pemilihan-pemilihan kepala desa, legislatif merupakan titik masuk potensial untuk intervensi pihak ketiga. Ini akan memberikan peluang bagi penerapan kebijakan tata kelola desa yang baik. Ini juga memberikan kesempatan untuk mereformasi lembaga dan kelembagaan desa untuk menerapkan aturan hukum yang memadai. Titik masuk politik ditulis baik dalam strategi jangka pendek maupun panjang.
3. Titik masuk ekonomi: Riefel dan Gilpin menyarankan bahwa reformasi ekonomi dapat memberikan peluang untuk transformasi dan pembangunan di desa-desa rawan konflik. Ini termasuk pembangunan kapasitas yang efektif, reformasi kebijakan yang bertujuan untuk pemberdayaan fiskal, mengurangi korupsi dan pengelolaan sumber daya yang bijaksana. Titik masuk ekonomi seharusnya hanya digunakan di masa depan setelah perdamaian dan lembaga dan kelembagaan desa yang cukup kuat sehingga pembangunan ekonomi dapat dipertimbangkan.

## **9. Mobilisasi Agen-agen Perubahan Perdamaian**

Sekarang setelah peluang untuk transformasi isu, titik masuk dan resistensi telah diidentifikasi, agen perubahan harus dimobilisasi untuk menerapkan strategi. Para agen perubahan damai dapat ditemukan di banyak tingkatan: desa, kecamatan, kabupaten, pihak-pihak berkonflik dan elit atau individu. Sering dianggap sebagai kelompok yang tidak signifikan atau tidak berpengaruh, transformasi konflik menekankan pentingnya peran pendukung mereka. Mereka dapat bertindak sebagai mitra, atau mediator dalam proses perubahan tanpa kekerasan, *peacebuilding* dan resolusi konflik. Agen-agen perubahan perdamaian, jika mereka bukan kepribadian yang berpengaruh, harus mewakili politik atau sosial tertentu.

## **10. Masyarakat Sipil**

Barnes menyarankan untuk menggunakan organisasi masyarakat sipil setempat (OMS) dalam membangun perdamaian yang abadi. Barnes berpendapat bahwa CSO

memiliki kapasitas untuk mendukung perubahan, mengarahkan perhatian pada akar penyebab konflik dan meningkatkan kesadaran tentang biaya-biaya atau kerugian-kerugian dari kekerasan yang berkelanjutan serta manfaat dialog konstruktif antara pihak. Mereka juga di lapangan untuk mengevaluasi kesenjangan kebijakan. Tujuan utama CSO adalah untuk mengubah sikap dan persepsi untuk mendorong masyarakat membayangkan masa depan yang lebih baik dan lebih inklusif. Masyarakat sipil memiliki kekuatan untuk mengedepankan agenda peacebuilding melalui pengaruh opini publik. Dengan merepresentasikan masyarakat, CSO dapat menghasilkan perubahan politik dan dengan demikian mengubah dinamika konflik. Kehadiran organisasi akar rumput dan LSM lokal memastikan bahwa kepentingan masyarakat etnis dilayani dan bahwa pemerintah tidak menggunakan kekuatan politiknya untuk mengintimidasi kelompok-kelompok yang berkonflik agar dapat melipatgandakan tuntutan mereka. Hasil pengamatan peran LSM dapat membantu menghentikan permusuhan dan memaksa pihak-pihak untuk terlibat dalam dialog. Organisasi akar rumput juga memiliki kemungkinan untuk menempatkan inisiatif budaya dan spiritual yang akan menarik bagi komunitas tertentu seperti proyek artistik, peringatan, ritual dan tindakan simbolik lainnya yang memberikan pengakuan kepada masyarakat setempat. Bobot langkah-langkah simbolis tidak boleh diremehkan.

Langkah-langkah untuk mendorong dialog antar-orang dan menumbuhkan perdamaian juga dapat mengambil bentuk lokakarya, debat publik tentang mengembangkan visi untuk masa depan, pertanyaan warga mengenai pembuatan kebijakan dan skala besar lainnya yang konstruktif dan inklusif dan pertemuan-pertemuan yang mendorong rekonsiliasi. Menurut Dudouet, rekonsiliasi melibatkan pengakuan kesalahan di masa lalu, memberikan suara kepada mereka yang tidak diizinkan untuk berbicara dan mengatasi masalah tersebut. Para pelaku kekerasan akan memiliki kesempatan untuk mengakui pengalaman mereka dalam audiensi publik.

## **11. Kelompok-kelompok Perempuan**

Organisasi-organisasi perempuan, kelompok-kelompok perempuan akar rumput, sudah terlibat dalam proses-proses perdamaian dengan cara spesifik mereka. Kegiatan-kegiatan perdamaian yang dikembangkan oleh organisasi-organisasi perempuan, kelompok-kelompok perempuan akar rumput acap kali juga membahas strategi penciptaan perdamaian, melalui pertemuan-pertemuan yang mereka adakan dan juga sejumlah pelatihan dan kegiatan yang mendorong rekonsiliasi dan publikasi yang menyerukan berakhirnya konflik dan kekerasan.

Penggunaan pemerksaan sebagai bagian dari kejadian konflik akan meningkatkan ketakutan di kalangan perempuan minoritas yang cenderung tidak ingin berpartisipasi dalam pembicaraan damai, lokakarya dan pelatihan. Keamanan dan perlindungan untuk perempuan harus dilaksanakan untuk melindungi perempuan dari kejahatan kekerasan. Perlu menciptakan pelibatan-pelibatan perempuan lintas etnis untuk mengupayakan perdamaian.

## **12. Lembaga Agama**

Dalam kasus konflik Balinuraga, institusi agama bisa menjadi agen utama perubahan damai. Meskipun telah diamati bahwa, di Kalianda, pemuka agama Hindu sangat terlibat dalam konflik dengan komunitas Muslim, jaringan keagamaan dapat memiliki pengaruh di mana kebijakan-kebijakan pelibatan agen perdamaian tidak dapat melakukan perubahan dengan cepat. Lembaga agama memiliki kapasitas pendidikan dan pengaruh yang tersebar luas, yang dapat digunakan untuk mengubah sikap dan nilai-nilai dan membangun dialog di antara masyarakat yang berbeda keyakinan. Kampanye edukatif, komunikasi pribadi dan dialog publik terbuka di hadapan pemuka agama Hindu dan Muslim dapat dilakukan dengan kendali lembaga-lembaga agama.

## **13. Keterlibatan Pemangku Kepentingan Utama**

Seperti yang disebutkan sebelumnya, transformasi konflik bertujuan untuk berakar dalam dan perubahan berkelanjutan yang memerlukan komitmen dan keterlibatan dari dalam.

Cara terbaik untuk terlibat dengan para pemangku kepentingan adalah negosiasi multi-pihak secara inklusif.

Dalam upaya untuk meredakan ketegangan dan membantu negosiasi, perlu hadirnya pihak-pihak untuk terlibat sebagai pengamat netral. Persaingan antara dua kekuatan itu kemungkinan akan membahayakan proses perdamaian. Untuk menghadapi konflik Balinuraga, pemerintah telah menunjuk tim yang telah membuat keputusan perdamaian dan mengusulkan program-program dan kegiatan-kegiatan rekonstruksi dan pemberdayaan ekonomi keluarga untuk pihak-pihak berkonflik.

Meskipun langkah-langkah ini menunjukkan keterlibatan positif, banyak lagi yang dapat dilakukan untuk menjangkau pihak-pihak yang bertikai:

1. Keterlibatan dengan pemangku kepentingan yang berbeda membutuhkan dialog konstruktif yang mengarah pada pembentukan kepercayaan. Ini memerlukan campur tangan pihak ketiga untuk tidak memiliki agenda tersembunyi dan bersikap netral. Oleh karena itu perlu bahwa pihak-pihak lain yang tidak diterima oleh kedua belah pihak tidak terlibat dalam proses perdamaian karena kepentingan-kepentingan tertentu mereka. Penyediaan dana dan sumber daya lain dari aktor pihak ketiga diperlukan. Pemantauan dan evaluasi yang cermat harus dilakukan untuk melacak penggunaan bantuan keuangan.
2. Penting untuk mengambil fokus dari proses perdamaian langsung dan fokus pada perubahan jangka panjang. Sangat penting untuk membangun kembali hubungan antara protagonis konflik. Hubungan tergantung pada orang, bukan organisasi maka kebutuhan untuk bekerja pada membangun kapasitas pribadi untuk pemecahan masalah. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui lokakarya dan memerlukan bantuan eksternal. Diskusi yang menghasilkan banyak membutuhkan kedua belah pihak untuk memulai di lapangan bermain yang sama oleh karena itu langkah-langkah pengembangan kapasitas pra-negosiasi harus diarahkan kepada para aktor yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Keterlibatan perempuan dan kelompok-

kelompok terpinggirkan lainnya sangat penting. Ketentuan mediator lokal dapat dipertimbangkan.

3. Keterlibatan pemangku kepentingan dapat ditingkatkan melalui pembentukan aliansi dengan lembaga regional maupun nasional. Ini akan memungkinkan pertukaran informasi, strategi, dan sumber daya dalam jangka panjang.
4. Media, baik lokal maupun regional dan nasional, mewakili sumber daya yang baik untuk perubahan. Dengan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu, melacak perubahan yang terjadi dan memberikan pengawasan, media memaksa para pemangku kepentingan utama untuk berkomitmen pada tugas mereka dan terlibat dalam proses transformasi. Pembentukan jurnalis warga harus dipertimbangkan untuk mendapatkan laporan dari lokakarya dan ukuran transformatif lainnya yang dilakukan.

## **V.2. Pembahasan**

Setelah menganalisis secara menyeluruh sistem konflik dan dinamika konflik serta mengusulkan strategi transformasi sistemik, tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk menyoroti dan membahas empat bidang utama perubahan yang memerlukan perhatian untuk menginduksi perubahan dalam sistem dan mentransformasikan konflik menuju perdamaian. Fokus pada empat bidang adalah transformasi individu, interpersonal, struktural dan masyarakat.

### **1. Transformasi Individu**

Transformasi konflik akan mengharuskan kedua belah pihak untuk melakukan kompromi, sasaran harus diubah melalui teknik tawar-menawar yang memperhitungkan ideologi, agama, masa lalu, mitos, dan karakteristik penting lainnya dari pihak-pihak konflik. Untuk mencapai hal ini, transformasi individu diperlukan. Dudouet menyebutkan kebutuhan untuk 'decommit', meninggalkan masa lalu di belakang dan melepaskan amarah dan ketidakpercayaan. Menurutnya, ini bisa dilakukan melalui pemberdayaan dan

pengakuan serta multi-level multi lintas dialog. Hal ini terutama dapat dilakukan melalui lokakarya dialog antar-orang, di hadapan mediator netral yang disetujui oleh peserta. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya tanggap, empati bersama dan pemahaman semua pihak yang terlibat.

Lokakarya dialog tersebut bertindak sebagai alat rekonsiliasi dan pertumbuhan pribadi. Perempuan harus sangat terlibat dalam proses itu. Dengan menjadi istri, ibu, saudara perempuan, pengasuh, kepala rumah tangga, mereka memiliki pengaruh, kekuatan persuasif dan kehadiran yang menyejukkan. Mereka sering hidup dalam konflik dengan cara yang berbeda daripada yang dilakukan oleh laki-laki, namun begitu sering mereka dikeluarkan dari rekonstruksi, rekonsiliasi dan langkah-langkah resolusi konflik lainnya.

Para pelaku agama juga harus berpartisipasi dalam lokakarya dialog, terutama dalam kerangka konflik antar etnis, antar agama. Umat agama-agama harus bersatu untuk saling mendengarkan dan mendapatkan pemahaman bersama tentang berbagai masalah. Dalam hal ini, mediator tidak boleh dari agama manapun untuk memastikan netralitas.

## **2. Transformasi Interpersonal**

Lederach menekankan pentingnya hubungan (*relationships*) dalam transformasi konflik dan mengusulkan langkah-langkah peningkatan kapasitas interpersonal dalam kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Studi ini menyarankan penggunaan komisi kebenaran dan rekonsiliasi dalam kerja sama dengan masyarakat sipil lokal. Menurut Curle, rekonsiliasi membantu transisi dari 'tidak menyenangkan' ke hubungan yang damai. Ini mendorong pengampunan dan melupakan dan menghapus hubungan dominasi dan posisi yang tidak tepat. Rekonsiliasi berpartisipasi dalam penyembuhan sosial dan psikologis sehingga memecah siklus kekerasan dan ketidakpercayaan. Komisi akan membutuhkan kehadiran perwakilan tokoh-tokoh dari semua pihak yang terlibat, yaitu pemerintah, para tokoh, kelompok etnis dan kelompok yang terpinggirkan. Namun pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa efisien mekanisme tindak lanjut harus digunakan sehingga perbaikan yang dijanjikan diberikan kepada para korban, marjinalisasi

para saksi dihindari, investigasi lebih lanjut tentang kejahatan yang dilakukan dan rekonsiliasi yang benar dapat terjadi.

Kedua, selain proses rekonsiliasi antar masyarakat, negosiasi yang lebih formal harus dilakukan antara pemangku kepentingan konflik untuk mengidentifikasi isu-isu utama dan solusi potensial. Ini adalah dasar dari perjanjian perdamaian di masa depan. Namun, itu adalah keterlibatan dalam proses diskusi menjadi penting, bukan hasil. Kuncinya adalah dilakukan negosiasi untuk menempatkan kesetaraan, rasa hormat, partisipasi dan saling memperkaya.

Langkah ketiga, setelah tingkat kepercayaan cukup ada, akan terjadi demobilisasi, dan rehabilitasi para korban maupun pelaku. Demobilisasi dan rehabilitasi bertumpu pada restrukturisasi hubungan antara kekuatan yang berlawanan dan itu harus menjadi proses yang disepakati bersama daripada diberlakukan secara sepihak. Keberhasilan demobilisasi dan ehabilitasi dapat dicapai melalui penciptaan peluang kerja tambahan dan terpenuhinya makanan, air, pakaian, dan kebutuhan dasar yang bisa meningkatkan keamanan manusia di wilayah konflik. Mereka harus membebaskan diri dari rasa takut terhadap yang lain. Sementara studi ini enggan menyarankan kehadiran aktor eksternal di lapangan, demobilisasi dan rehabilitasi dapat difasilitasi oleh agen-agen pembangunan perdamaian. Perubahan harus dilakukan di tingkat komunitas dan pemerintah daerah yang terendah. Masyarakat luar seharusnya hanya bertindak sebagai penggerak perubahan dan fasilitator.

### **3. Transformasi Masyarakat**

Kebutuhan akan transformasi budaya sering diremehkan. Namun demikian penting dalam konflik etnis untuk menciptakan rasa atau menguatkan identitas. Studi ini menyarankan penciptaan program pendidikan yang dirancang untuk mengajarkan anak-anak tentang bangsa mereka dan kesetaraan antar etnis. Kebijakan bahasa juga harus diterapkan untuk memastikan rasa hormat dari semua dialek. Simbolis langkah-langkah seperti pengakuan perbedaan antara kelompok etnis dan penghormatan dari perbedaan tersebut menciptakan perubahan signifikan dalam sikap.

Pengembangan kegiatan budaya yang mengelompokkan berbagai kelompok etnis juga diperlukan untuk menciptakan rasa keintiman di antara kelompok-kelompok. Keterlibatan dalam kegiatan semacam itu dapat membantu peserta memahami satu sama lain di luar etnis mereka. Ini Kegiatan bisa berupa musik, teater, olahraga, permainan untuk anak-anak melukis, kelas, klub buku dan asosiasi budaya lainnya. Misalnya, menyiapkan turnamen sepak bola antara umat Hindu dan Muslim dengan tim campuran dapat membantu kedua kelompok melihat yang lainnya dalam situasi yang berbeda, sebagai aktor yang berbeda, sebagai rekan satu tim atau lawan, bukan sebagai musuh.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN**

Studi ini telah menunjukkan analisis tentang multiple sistem mengenai konflik di Balinuraga melalui lensa transformasi konflik dan teori kompleksitas. Tujuan dari penelitian ini bukan untuk mengkritik teori melainkan untuk menguji penerapannya dalam konflik etnis dan agama yang berulang. Teori kompleksitas telah memberikan wawasan ke dalam sifat kompleksitas dari konflik dengan kekerasan, sementara teori transformasi konflik membantu menyarankan sudut baru untuk mendekati konflik.

Temuan-temuan menunjukkan bahwa transformasi konflik dapat membawa suatu wilayah, kelompok menjadi maju, menuju demokrasi, pembangunan dan perdamaian. Ini membutuhkan implementasi yang hati-hati dan pemantauan sistematis serta komitmen dari semua pemangku kepentingan yang berkonflik dan bantuan eksternal potensial. Transformasi konflik, termasuk rekonsiliasi, perubahan tata kelola, transformasi sikap dan perilaku serta pembangunan kepercayaan adalah proses untuk mengungkap dalam waktu yang cukup lama, bahkan puluhan tahun dan orang seharusnya tidak mengharapkan hasil segera.

Memang ada sejumlah kekurangan dalam penerapan transformasi konflik. Salah satu poin utama pertikaian adalah keinginan dan kebutuhan untuk melibatkan komunitas yang lebih besar melalui ikatan etnis dan OMS. Memang ada keengganan untuk ikut serta dalam urusan internal mereka, namun kehadiran mediator, pengamat dan fasilitator, pelatih yang netral nampaknya penting untuk membangun transformasi konflik di Balinuraga. Banyaknya narasi yang dipegang oleh berbagai pihak yang bertikai dan variasi masalah yang saling bertentangan di antara sistem yang berbeda menyulitkan untuk membayangkan langkah-langkah yang tepat untuk diambil tanpa terlihat mendukung salah satu aktor konflik. Oleh karena itu ada kontradiksi antara pendekatan bottom up yang disarankan oleh Lederach dan perlunya intervensi eksternal. Kedua, skeptisisme telah dinyatakan mengenai kemungkinan tidak hanya melibatkan proses perubahan, tetapi lebih penting lagi

mengendalikannya mengingat pentingnya teori menempatkan pada faktor-faktor hubungan dan individu. Teori kompleksitas telah disorot ketidakpastian hasil karena perubahan tingkat mikro di dalam sistem menginduksi perubahan tingkat makro. Selain itu, transformasi konflik membutuhkan komitmen jangka panjang dari berbagai pihak yang mungkin tidak dapat mendedikasikan sumber daya yang memadai, dana, waktu, mekanisme pemantauan, ruang negosiasi dan dukungan yang diperlukan untuk penyelesaian konflik. Selain itu, mengingat jumlah aktor yang terlibat dalam transformasi, komunikasi, fleksibilitas dan saling pengertian adalah hal yang penting. Ini membutuhkan adaptasi budaya. Akhirnya, konsekuensi, yang dimaksudkan atau tidak diinginkan, bermanfaat atau berbahaya, transformasi konflik sistemik hanya akan dapat diamati selama beberapa dekade berikutnya sehingga sulit untuk mengevaluasi keabsahan pendekatan Lederach.

Pemantauan situasi secara konstan serta penelitian lebih lanjut sebagai situasi perlu dilakukan. Studi ini hanya menawarkan wawasan pengantar tentang potensi transformasi konflik di Balinuraga.

## DAFTAR PUSTAKA

Boulding. 1962. *Conflict and Defense: a general theory*. New York: Harper and Brothers. Page: 23, 24.

Collier. 2003. *Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development Policy*. Oxford: Oxford University Press. Page: 83.

Diamond and McDonald. 1996. *Multi-Track Diplomacy: a Systems Approach to Peace*. Washington D.C.: Kumarian Press. Page: 3.

Dudouet, Veronique. 2006. 'Transitions from Violence to Peace: Revisiting Analysis and Intervention in Conflict Transformation'. *Berghof Handbook for Conflict Transformation*. Page: 24.

Galtung, J. 1996. *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. SAGE Publications. Page: 51, 68.

Hendrick, Diane. 2009. 'Complexity Theory and Conflict Transformation'. *Working Paper 17* Centre for Conflict Resolution, University of Bradford. Page: 26.

Hollis and Smith. 1990. *Explaining and understanding international relations*. Oxford: Clarendon Press.

Kriesberg. 2011. "The State of the Art in Conflict Transformation". *Berghof Handbook for Conflict Transformation*. Page: 59.

Lapid. 1989. "The Third Debate: On the Prospects of International Theory in a Post-Positivist Era". *International Studies Quarterly* 33 (3): 240.

Lederach, J.P. 1995. *Preparing for Peace: Conflict Transformation Across Cultures*. Syracuse University Press. Page: 5, 200.

Lederach, J.P. 1997. *Building peace: sustainable reconciliation in divided societies*. United States Institute of Peace Press (USIP Press). Page: 31.

Lederach. 2003. *The Little Book of Conflict Transformation*. Intercourse, PA: Good Books. Page: 3, 7, 11.

Miall. 2004. "Conflict Transformation: A Multi-Dimensional Task". Page: 3.

Mu'id, Onaje. 2003. Shortcomings of the Conflict Resolution Field Retrieved from:

<http://www.beyondintractability.org/audioplay/muid-o-4-field1>

Paffenholz, Thania. 2004. 'Designing Transformation and Intervention Processes'. *Berghof Handbook for Conflict Transformation*. Page: 4.

Ramsbotham, et al. 2005. *Contemporary Conflict Resolution. The Prevention, Management and Transformation of Deadly Conflicts*. London: Polity. Page: 100.

Ropers, Norbert. 2008. 'Systemic Conflict Transformation: Reflections on the Conflict and Peace Process in Sri Lanka'. *Berghof Handbook for Conflict Transformation*. Page: 2.

Ryan. 2013. *The Transformation of Violent Intercommunal Conflict*. Ashgate Publishing, Limited. Page: 8.

United Nations. 2007. "Peacebuilding and the United Nations" Retrieved from:

<http://www.un.org/en/peacebuilding/pbso/pbun.shtml>.

United Nations. 2013. "Demographic and social statistics: Ethnocultural characteristics"

Retrieved from: [http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/popchar/\\_popcharmethods.htm](http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/popchar/_popcharmethods.htm)

Walby, Sylvia. 2003. 'Complexity theory, Globalisation and Diversity'. *Paper presented to conference of the British Sociological Association, University of Leeds*. Page: 6.

Wehr. 1979. *Conflict regulation*. Boulder, Colorado: Westview Press.

Wils, Oliver, Ulrike Hopp, Norbert Ropers, Luxshi Vimalarajah and Wolfram Zünzer. 2006. 'The Systemic Approach to Conflict Transformation Concept and Fields of Application'. *Berlin: Berghof Foundation for Peace Support*. Page: 4, 5, 52.